



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Magelang**



Tahun Anggaran 2025

 <https://bpbdmagelangkota.go.id>

 bpbdkotamagelang@gmail.com

 (0293) 319 3701

Jl. Lamtoro No.71, Tidar Baru, Kota Magelang



Kata Pengantar

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan dinamika dan kebijakan pemerintah daerah. Perubahan Renja menjadi instrumen penting untuk melakukan penyesuaian target dan strategi pelaksanaan, salah satunya akibat adanya kebijakan penyesuaian anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dampak dari adanya defisit anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025. Melalui Perubahan Renja ini, BPBD Kota Magelang diharapkan tetap mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, memastikan pelayanan penanggulangan bencana berjalan efektif, serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan meskipun terdapat keterbatasan sumber daya. Penyesuaian ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada demi terwujudnya ketangguhan daerah dalam menghadapi potensi bencana. Dengan semangat kebersamaan, profesionalisme, dan komitmen terhadap pelayanan publik, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian kita bagi masyarakat serta melindungi Kota Magelang dari segala bencana dan marabahaya.

Magelang, Agustus 2025
KEPALA PELAKSANA
BPBD KOTA MAGELANG

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001

Kata Pengantar

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan dinamika dan kebijakan pemerintah daerah. Perubahan Renja menjadi instrumen penting untuk melakukan penyesuaian target dan strategi pelaksanaan, salah satunya akibat adanya kebijakan penyesuaian anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dampak dari adanya defisit anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025. Melalui Perubahan Renja ini, BPBD Kota Magelang diharapkan tetap mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, memastikan pelayanan penanggulangan bencana berjalan efektif, serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan meskipun terdapat keterbatasan sumber daya. Penyesuaian ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada demi terwujudnya ketangguhan daerah dalam menghadapi potensi bencana. Dengan semangat kebersamaan, profesionalisme, dan komitmen terhadap pelayanan publik, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian kita bagi masyarakat serta melindungi Kota Magelang dari segala bencana dan marabahaya.

Magelang, Agustus 2025
KEPALA PELAKSANA
BPBD KOTA MAGELANG

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan :.....	8
BAB II EVALUASI RENJA HASIL PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.	9
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025	19
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	39
BAB IV PENUTUP	50

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024.....	10
Tabel 2. 2 Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	19
Tabel 2. 3 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan Triwulan II	21
Tabel 3. 1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 :

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam satu tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2025 selanjutnya perubahan Renja BPBD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perubahan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Renja Perubahan SKPD BPBD Kota Magelang Tahun 2025 disusun berdasarkan pada:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
10. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang.
39. Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 000.7.2.6/210/112 Tahun 2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan perubahan Renja BPBD Kota Magelang adalah penyesuaian rencana program, kegiatan dan subkegiatan dengan kebijakan, prioritas pembangunan daerah serta kondisi kebutuhan di lapangan termasuk penyesuaian alokasi anggaran tahun berjalan.

Adapun tujuan perubahan Renja BPBD Kota Magelang Tahun 2025, yakni:

1. Penyesuaian target kinerja
2. Memastikan program dan kegiatan daerah tetap relevan dengan prioritas pembangunan daerah.
3. Sebagai dasar sinkronisasi visi dan misi Kepala Daerah dengan Program yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya

1.4 Sistematika Penulisan :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja, dan sistematika Penyusunan Perubahan Renja SKPD

BAB II EVALUASI R E N J A HASIL BPBD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah,

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Memuat catatan atau poin penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tidak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA HASIL PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) terjadi karena adanya berbagai faktor yang menyebabkan rencana yang telah disusun sebelumnya perlu disesuaikan dengan kondisi terkini. Perubahan ini dapat disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Selain itu, adanya kebutuhan yang wajib dialokasikan, juga menjadi salah satu pemicunya. Dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menimbulkan kebutuhan baru di masyarakat turut mendorong perlunya penyesuaian rencana kerja. Di sisi lain, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya sering kali menunjukkan perlunya penyesuaian target indikator. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana target, sasaran, dan indikator kinerja yang telah direncanakan dapat tercapai serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dari hasil evaluasi tersebut, sering kali ditemukan bahwa beberapa kegiatan perlu disesuaikan, diperbaiki, atau bahkan diganti karena tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat atau tidak efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Selain itu, evaluasi juga dapat menunjukkan adanya kebutuhan baru, pergeseran kebutuhan. Berdasarkan hasil tersebut, perubahan Renja PD dilakukan agar rencana kerja tahun berjalan lebih realistis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dengan kata lain, perubahan Renja PD merupakan bentuk tindak lanjut dari proses evaluasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tidak kalah penting, terbitnya regulasi atau peraturan baru dari pemerintah pusat maupun daerah, juga menjadi alasan kuat dilakukannya perubahan Renja PD agar tetap relevan, responsif, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Adapun hasil evaluasi perangkat daerah terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (th 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		100%	1005	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan kantor, perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	1 dokumen	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	17 orang	17 orang	16 orang	100%	20 orang	20 orang	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laopran	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi perangkat daerah	100%	100%-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 paket	78 paket	-	-	-	-	-	-
	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Administrasi Umum Yang disediakan	100%	100%	100%	10%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan-	1 paket	-	6 paket	6 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3 paket	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	5 paket	12 paket	12 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	5 paket	6 paket	6 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	19 paket	18 paket	12 paket	12 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	13 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 lapran	12 laporan	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Peninjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Hasil Pengandaan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unt	3 unit	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	47 unit	-	-	100%	-	-	-

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 unit	18 unit	3 unit	3 unit	100%	-	-	100%
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	1 unit	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 unit	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	100%	12 laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 unit	9 unit	11 unit	11 unit	100%	11 unit	11 unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%

	Lapangan									
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	24 unit	-	5 unit	5 unit	100%	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	4 unit	13 unit	13 unit	100%	8 unit	8 unit	100%
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 unit	-	-		-	1 unit	0	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Program penanggulangan bencana	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	0%
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150 org	150 orang	150 orang	150 orang	100%	300 orang	300 orang	100%

	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	100%	3 kawasan	3 kawasan	100%
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	26 unit	23 unit	20 buah	20 unit	100%	20 unit	20 unit	100%
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	100%	2 kawasan	2 kawasan	100%
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	70 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	30 orang	100%

	Penanganan Pasca Bencana Kabypaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	-	13 dokumen	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	70 orang	-	100 orang	100 orang	100%	175 orang	175 orang	100%
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1 orang	1 orang	1 orang	0	0%	1 orang	0	100%
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik	60 orang	25 orang	15 Orang	15 orang	100%	20 orang	20 orang	100%

	Bencana Kabupaten/ Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 laporan	-	1 laporan	0	0%	1 laporan	0	100%
	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase jumlah dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	0%
	Koordinasi dan Penanganan Pasca Bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	12 kegiatan	-	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025

Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk monitoring dan pengendalian terhadap capaian kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen Renja Tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana realisasi pelaksanaan kegiatan telah mencapai target kinerja dan serapan anggaran yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi dilakukan berdasarkan data capaian kinerja yang dihimpun dari seluruh bidang/unit kerja di lingkungan perangkat daerah. Capaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 masih mengacu pada capaian kinerja Tahun 2024. Hal ini dikarenakan penilaian capaian tujuan dan sasaran BPBD dilakukana serana rutin tahunan, tidak dapat dinilai secara mandiri. Penilaian dilakukan oleh Tim Verifikasi dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, dan hasilnya akan melalui proses pengecekan serta validasi lebih lanjut untuk kemudian ditetapkan sebagai nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Adapun hasil penilaian atas tujuan sasaran BPBD Kota Magelang sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Derah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target th 2025	Realisasi th 2025 sd TW II
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah		Indeks Ketahanan Daerah	57.40	48
2		Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Jumlah Tercapainya tujuh prioritas	57.40	48

Perlu diketahui bahwa target yang tercantum dalam dokumen Perubahan Renja tahun 2025 merujuk pada sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021–2026 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang Tahun 2022–2026. Penetapan target tersebut telah disusun dan disahkan melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga menjadi acuan resmi bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode perencanaan.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa BPBD Kota Magelang sebagai OPD yang secara khusus menangani urusan penanggulangan bencana baru terbentuk pada tahun 2022, sedangkan target RPJMD telah dirumuskan dan ditetapkan lebih dahulu pada tahun 2021. Kondisi ini menyebabkan adanya keterlambatan dalam kesiapan kelembagaan pelaksana, baik dari sisi struktur organisasi, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana pendukung. Akibatnya, pada tahun-tahun awal pelaksanaan RPJMD, capaian indikator

kinerja belum dapat optimal karena BPBD masih berada dalam tahap pembentukan dan penyesuaian fungsi kelembagaan.

Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa target yang tercantum dalam RPJMD bersifat tetap dan tidak dapat diubah selama periode perencanaan berjalan, kecuali melalui mekanisme perubahan RPJMD yang ditetapkan secara resmi melalui peraturan daerah. Dengan demikian, BPBD Kota Magelang tetap berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian target tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui optimalisasi sumber daya, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Seiring dengan berjalannya waktu, BPBD Kota Magelang telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas organisasi, membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terkoordinasi, dan meningkatkan kualitas layanan kebencanaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun-tahun awal perlu dipahami sebagai fase konsolidasi kelembagaan, sedangkan peningkatan capaian di tahun-tahun berikutnya diharapkan menjadi wujud dari pemantapan peran dan fungsi BPBD dalam mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Magelang 2021–2026.

Tabel 2. 3 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan Triwulan II

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD yg dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	
						Triwulan I		Triwulan II					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja	%	100	5.140.492.600	100%	900.695.801	100%	1.895.496.022	50%	1.895.496.022	50%	36.87%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	%	100	73.765.000	25%	1.335.200	50%	2.045.000	50%	2.045.000	50%	2.77%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	64.215.000	-	0	-	377.000	-	377.000	0	0.59%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	dokumen	1	2.342.000	1 dok	182.000	-	182.000	0	182.000	0	7.77%

		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	2.342.000	-	0	-	0	1	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1.383.000	1 dok	740.200	-	740.200	1 dok	740.200	100%	53.52%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1.383.000	-	0	-	154.800	-	154.800	0	11.19%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	2.100.000	3 lap	413.000	6 lap	591.000	6 lap	591.000	50%	28.14%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang tersedia	%	100	4.034.766.000	25%	841.233.232	25%	1.756.766.804	50%	1.756.766.804	50%	43.54%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	20	4.018.546.000	20	839.791.432	20	1.753.959.004	20	1.753.959.004	100%	43.65%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1.150.000	1 dok	254.800	-	319.800	1 dok	319.800	100 %	27.81%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesterab	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	12	15.070.000	3 dok	1.187.000	6 dok	2.488.000	6 dok	2.488.000	50%	16.51%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum PD yang tersedia	%	100	158.512.000	25%	10.330.723	50%	28.841.505	50%	28.841.505	50%	18.20%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	5.976.000	1 pkt	499.500	2 pkt	1.455.500	2 pkt	1.455.500	8.33%	24.36%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	5.000.000	1 pkt	0	1 pkt	992.000	1 pkt	992.000	16.67%	19.84%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3	22.072.000	3 pkt	3.779.373	6 pkt	9.682.155	6 pkt	9.682.155	100%	43.87%
	Penyediaan Barang Cetak dan Peanggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peanggandaan yang Disediakan	paket	3	7.986.000	3 pkt	1.193.850	4 pkt	3.101.850	4 pkt	3.101.850	100%	38.84%

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	7.356.000	2 dok	750.000	2 dok	1.250.000	2 dok	1.250.000	50%	17%
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	19	11.437.000	3 pkt	1.638.500	6 pkt	4.465.500	6 pkt	4.465.500	50%	39.04%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	5.455.000	3 lap	0	3 lap	0	6 lap	0	50%	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	93.230.000	3 lap	2.469.500	6 lap	7.894.500	6 lap	7.894.500	50%	8.47%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	335.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin	Unit	33	335.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

		Lainnya yang disediakan											
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang tersedia	%	100	179.970.000	25%	28.714.842	25%	52.198.041	50%	52.198.041	50%	29.00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	24.970.000	3 lap	2.848.350	6 lap	5.200.150	6 lap	5.200.150	50%	20.83%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	85.000.000	3 lap	12.130.631	6 lap	24.091.764	6 lap	24.091.764	50%	28.34%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	70.000.000	3 lap	13.735.861	6 lap	22.906.127	3 lap	22.906.127	50%	32.72%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	100	482.850.000	25%	19.081.804	25%	55.644.672	50%	55.644.672	50%	11.52%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	13	223.470.000	11 unit	16.686.187	11 unit	36.390.281	11 unit	36.390.281	84.62%	16.28%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	10	165.000.000	2 unit	2.116.618	2 unit	16.193.641	2 unit	16.193.641	20%	9.81%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	60	94.380.000	2 unit	279.000	5 unit	3.060.750	5 unit	3.060.750	50%	3.24%
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Layanan Penanggulang an Bencana	%	100	2.510.312.000	100%	84.135.119	100%	202.345.669	100%	202.345.669	100%	8.06%

	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%	100	95.387.000	25%	0	0	10.795.100	50%	10.795.100	50%	11.32%
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	orang	150	95.387.000	0	0	0	10.795.100	120 org	10.795.100	80%	11.32%
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	1.411.035.000	25%	46.414.119	25%	118.430.469	50%	118.430.469	50%	8.39%

	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	unit	6	366.025.000	4 unit	3.272.000	10 unit	18.879.500	10 unit	18.879.500	100%	5.16%
	Gladi Kesiapsiagaan thd Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	orang	70	66.550.000		0	100 org	4.375.900	100 org	4.375.900	100%	6.57%
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan	kawasan	3	33.275.000	0	0		0	0	0	0	0

	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencanan Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	orang	70	53.240.000	0	0	0	0	0	0	0
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	dokumen	1	100.000.000		0	0	0	0	0	0
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan	12	545.710.000	3 lap	42.632.119	6 lap	92.775.069	6 lap	92.775.069	50% 17.00%
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0

	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	orang	150	246.235.000	0	0	0	780.000	0	780.000	0	0.32%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Peentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	784.275.000	25%	35.991.000	25%	69.260.100	50%	69.260.100	50%	8.83%
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	laporan	4	153.065.000	1 lap	11.676.200	2 lap	2.476.200	2 lap	2.476.200	50%	1.62%
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan	dokumen	1	425.920.000	-	27.705.600	-	52.908.200	-	52.908.200	0	12.42%

		Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat											
	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	orang	1	25.500.000	1 org	0	0	850.000	1 org	850.000	0	3.33%
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	15	119.790.000	11 org	6.609.200	20 org	13.025.700	20 org	13.025.700	20%	10.87%
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	laporan	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	%	100	219.615.000	25%	1.730.000	25%	3.860.0000	50%	3.860.0000	50%	1.76%
	Koordinasi dan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/K ota yang dilegalkan	laporan	12	219.615.000	2 lap	1.730.000	5 lap	3.860.000	5 lap	3.860.000	50%	1.76%

Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 turut memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan di BPBD Kota Magelang. Kebijakan nasional tersebut mendorong dilakukannya penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Sebagai konsekuensinya, BPBD Kota Magelang perlu melakukan penyesuaian pelaksanaan terhadap beberapa kegiatan. Selain itu, adanya kebijakan daerah juga menyebabkan sebagian kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah dilaksanakan perubahan anggaran, guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan prioritas pendanaan yang telah ditetapkan.

Beberapa kegiatan prioritas BPBD Kota Magelang telah menunjukkan hasil yang cukup baik, khususnya kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat pada saat tanggap darurat dan pascabencana. Pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan baik karena didukung oleh koordinasi yang cepat serta respon lapangan yang efektif. Walaupun kegiatan pada pelayanan saat kedaruratan dan pascabencana berjalan dengan baik, namun untuk beberapa target indikator kegiatan tidak dapat tercapai, hal ini disebabkan bukan karena kinerja yang buruk, namun semata bahwa indikator tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk kejadian bencana yang berskala besar, atau peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan kejadian di Kota Magelang tidak termasuk kategori BENCANA.

Sementara itu, pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan masih terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya belum optimal, terutama pada kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Salah satu faktor penyebabnya adalah penyesuaian penempatan anggaran yang harus dilakukan pada saat perubahan anggaran. Kondisi tersebut berdampak pada pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan, sehingga sebagian kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan rencana awal.

Selain faktor anggaran, kendala utama lainnya terletak pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Saat ini, bidang tersebut hanya memiliki dua personel utama, yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta seorang Analis Kebencanaan Ahli Muda. Jumlah SDM yang sangat terbatas ini menyebabkan beban kerja menjadi tinggi, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan perencanaan teknis, koordinasi lintas sektor, serta edukasi dan pendampingan masyarakat di lapangan.

Peningkatan kapasitas dan jumlah SDM pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan seharusnya menjadi prioritas penting agar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan BPBD dapat berjalan

lebih optimal dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, BPBD Kota Magelang berupaya melakukan optimalisasi pelaksanaan program melalui strategi kolaboratif dengan berbagai pihak. Salah satu bentuk nyata dari upaya kolaborasi tersebut adalah pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Magelang pada tahun berjalan. FPRB ini dibentuk sebagai wadah koordinasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media dalam upaya pengurangan risiko bencana secara terpadu dan berkelanjutan.

Melalui keberadaan FPRB, diharapkan upaya pencegahan, mitigasi, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan partisipatif. Forum ini juga menjadi sarana untuk memperkuat jejaring komunikasi, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Kota Magelang.

Ke depan, BPBD Kota Magelang akan terus memperkuat kolaborasi ini serta mendorong peran aktif seluruh unsur dalam FPRB, sehingga pelaksanaan program pengurangan risiko bencana dapat berjalan lebih optimal meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, diharapkan tercipta sinergi kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang semakin kuat menuju Kota Magelang yang tangguh dan siap menghadapi bencana.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, perangkat daerah melakukan langkah-langkah perbaikan melalui percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi penyerapan anggaran pada Triwulan III dan IV, serta peningkatan koordinasi antarbidang untuk memastikan target kinerja dapat tercapai sesuai rencana. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya agar lebih realistis dan adaptif terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan bahwa perangkat daerah telah berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target kinerja tahunan, dengan tetap memerlukan penguatan pada aspek perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi, penyerapan anggaran tahun 2025 sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.097.841.691,- atau sebesar 42.57 % dari total anggaran sebesar Rp. 4.928.536.185,- jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya, realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 9,47 % . Atas capaian tersebut beberapa kegiatan telah mencapai target, dan beberapa kegiatan tidak/belum mencapai target :

A. Program kegiatan dari hasil evaluasi yang direncanakan telah mencapai mencapai target :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
- Koordinasi dan Penyusunan RKA –SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA –SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b. Program Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
 - Respon Cepat Darurat Kabupaten/Kota
 - Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Koordinasi dan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

B. Program Kegiatan yang Tidak Mencapai Target :

- ii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
- iii. Program Penanggulangan Bencana
 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Kontijensi
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Koordinasi dan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

C. Program Kegiatan yang Melebihi Target :

NIHIL

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BPBD Kota Magelang merupakan salah satu dari dua daerah yang terakhir di Jawa Tengah memiliki OPD khusus yang menangani bencana, sehingga hal ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kurang optimal, diantaranya disebabkan :

1. Kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD,
2. Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
3. Belum semua kawasan mempunyai kemampuan dalam menghadapi bencana
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak bencana
5. Belum terbentuknya forum pengurangan risiko bencana

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) BPBD Tahun 2025, terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam aspek penganggaran.

Sehubungan dengan hal itu, terdapat beberapa subkegiatan yang perlu disesuaikan target indikator kinerjanya, bahkan terdapat kegiatan yang telah direncanakan pada anggaran penetapan harus ditunda pelaksanaannya yaitu Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan nilai anggaran sebesar Rp. 275.679.700,-. Selain itu, muncul pula subkegiatan baru yang sebelumnya belum tercantum dalam penetapan Anggaran Tahun 2025 yaitu sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan nilai anggaran sebesar Rp. 238.772.100,- dengan rincian sebesar Rp. 149.932.600,- diperutukkan Pembangunan Gudang peralatan dan logistik penanggulangan bencana dan Rp. 88.839.500,- diperuntukkan rehab atap Gedung ruang kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, serta atas Gedung ruang kerja subbag program dan keuangan, umum dan kepegawaian , juga terdapat beberapa sub kegiatan yang menambah pagu anggaran :,

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bertambah Rp. 44.999.984,-
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor bertambah Rp. 598.200,-
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertambah Rp. 500.000,-
4. Penyediaan Bahan/Material bertambah Rp. 1.288.000,-
5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bertambah 12.219.234,- (kegiatan ini mengakomodir belanja jasa driver dan petugas kebersihan, dimana pada penetapan anggaran 2025 baru dianggarkan sembilan (9) bulan , sehingga tambahan tersebut mengakomodir untuk tiga bulan berikutnya.
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mmesin Lainnya bertambah 9.258.352,-
7. Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota mengalami penambahan anggaran sebesar Rp57.814.185,-. Penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja peralatan kebencanaan berupa drone. Peralatan ini sebenarnya telah dianggarkan pada penetapan Tahun 2025, namun berdasarkan pertimbangan terhadap standar peralatan penanggulangan bencana, diperlukan peningkatan spesifikasi dan kualitas peralatan dimaksud. Konsekuensinya, terjadi penyesuaian pagu anggaran guna memastikan peralatan yang dibeli memenuhi

standar operasional yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana

8. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota bertambah Rp. 11.926.136
9. Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota mengalami penambahan anggaran sebesar Rp34.194.357,-. Penambahan anggaran tersebut digunakan untuk belanja jasa tenaga non-ASN BPBD yang direkrut sebagai satuan petugas penanggulangan bencana. Pada penetapan Tahun 2025, anggaran untuk tenaga non-ASN tersebut baru dialokasikan selama sembilan (9) bulan, sehingga penambahan ini diperlukan untuk pemenuhan pembayaran selama tiga (3) bulan berikutnya, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal sepanjang tahun anggaran.
10. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota bertambah Rp. 3.822.000,- dan,
11. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota bertambah Rp. 2.152.620,-

Salah satu acuan di dalam penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2025 adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, di dalam Keputusan ini BPBD masuk Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada program Penanggulangan Bencana yang menjadi satu satunya program pada BPBD selain program penunjang.

Adapun Rencana kerja perubahan BPBD tahun anggaran 2025 memuat : 2 program, 10 kegiatan dan 39 sub kegiatan:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 6 sub kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA—SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 8 sub kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 6. Penyediaan Bahan/Material
 7. Fasilitas Kunjungan Tamu
 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Penanggulangan Bencana terdiri dari 4 kegiatan :
- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan :
 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana terdiri dari 7 sub kegiatan :
 1. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 2. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten Kota
 5. Penyusunan Rencana Kontijensi

6. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
7. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana terdiri dari 5 sub kegiatan:
 1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Zoonosis Prioritas
 2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 3. Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 4. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korbna Bencana Kabupaten/Kota
 5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 1. Koordinasi dan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Secara rinci perubahan, baik pengurangan maupun pemanbagan anggaran dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan		Anggaran Setelah Perubahan		kr/lbh
			Rincian	Pagu Anggaran	Rincian	Pagu Anggaran	
Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Blj Barang Pakai Habis	2.581.500	Blj Barang Pakai Habis	2.581.500	0
		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Blj Barang Pakai Habis	634.000	Blj Barang Pakai Habis	444.000	-190.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Blj Barang Pakai Habis	634.000	Blj Barang Pakai Habis	444.000	-190.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Blj Barang Pakai Habis	754.800	Blj Barang Pakai Habis	754.800	0
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Blj Barang Pakai Habis	754.800	Blj Barang Pakai Habis	613.600	-141.200
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Blj Barang Pakai Habis	6.255.288	Blj Barang Pakai Habis	2.412.628	-3.842.660
	Administrasi Keuangan PD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	3.679.028	Gaji dan Tunjangan ASN	3.724.509.012	44.999.984
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Blj Barang Pakai Habis	571.000	Blj Barang Pakai Habis	334.000	237.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Blj Barang Pakai Habis	7.603.100	Blj Barang Pakai Habis	5.245.700	2.357.400
	Administrasi Umum PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Blj Barang Pakai Habis	2.387.843	Blj Barang Pakai Habis	2.986.043	598.200
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Blj Barang Pakai Habis	606.400	Blj Barang Pakai Habis	606.400	0

			Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	941.600	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	405.000	-536.600
		Penyediaan Bahan Logistik	Blj Barang Pakai Habis	25.860.700	Blj Barang Pakai Habis	26.360.700	500.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penanggandaan	Blj Barang Pakai Habis	8.098.400	Blj Barang Pakai Habis	7.237.000	-861.400
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Blj Jasa Kantor	3.240.000	Blj Barang Pakai Habis	3.240.000	0
		Penyediaan Bahan Material	Blj Barang Pakai Habis	10.178.500	Blj Barang Pakai Habis	11.466.500	1.288.000
		Fasilitasi Kunjangan Tamu	Blj Barang Pakai Habis	960.000	Blj Barang Pakai Habis	720.000	-240.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Blj Perjalanan Dinas	54.652.000	Blj Barang Pakai Habis	27.326.000	-27.326.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Komputer Unit	51.000.000	Belanja Modal Komputer Unit	51.000.000	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Blj Barang Pakai Habis	20.204.400	Blj Barang Pakai Habis	12.956.300	-7.248.100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Blj Jasa Kantor	68.304.000	Blj Jasa Kantor	59.400.000	-8.904.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan	Blj Jasa Kantor	41.052.000	Blj Jasa Kantor	52.536.000	11.484.000

		Umum Kantor					
			Blj Iuran Jaminan/Asuransi	1.750.446	Blj Iuran Jaminan/Asuransi	2.485.680	735.234
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Blj Jasa Kantor	6.700.000	Blj Jasa Kantor	14.000.000	7.300.000
			Blj Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.273.241	Blj Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.954.930	-22.318.311
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Blj Jasa Kantor	3.600.000	Blj Jasa Kantor	6.400.000	2.800.000
			Blj Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46.417.948	Blj Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.813.461	-11.604.487
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Blj Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.175.248	Blj Pemeliharaan	20.433.600	9.258.352
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna Lainnya	Blj Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	Blj Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	88.839.500	88.839.500
			Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	149.932.600	149.932.600
Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Blj Barang Pakai Habis	11.400.800	Blj Barang Pakai Habis	11.400.800	0

	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota					
			Blj Jasa Kantor	3.900.000	Blj Jasa Kantor	3.900.000	0
			Blj Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.960.000	Blj Perjalanan Dinas	3.980.000	-3.980.000
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Belanja Barang Pakai Habis	21.247.500	Belanja Barang Pakai Habis	20.904.200	-252.300
			Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	7.910.000	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	7.910.000	0
			Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.000.000	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.000.000	0
			Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	964.300	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	964.300	0
			Belanja Modal Alat Kantor	3.462.000	Belanja Modal Alat Kantor	3.462.000	0
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.381.900	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	68.449.385	58.067.485
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap	Belanja Barang	8.252.100	Belanja Barang	16.528.236	8.276.136

		Bencana Kabupaten/Kota	Pakai Habis		Pakai Habis		
			Belanja Jasa Kantor	1.050.000	Belanja Jasa Kantor	5.950.000	4.900.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.250.000	-1.250.000
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Belanja Barang Pakai Habis	15.753.300	Belanja Barang Pakai Habis	10.642.600	-5.110.700
			Belanja Jasa Kantor	5.175.000	Belanja Jasa Kantor	12.125.000	7.100.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.020.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.260.000	-3.760.000
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Belanja Barang Pakai Habis	11.263.200	Belanja Barang Pakai Habis	10.109.300	-1.153.900
			Belanja Jasa Kantor	1.050.000	Belanja Jasa Kantor	5.050.000	4.000.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.990.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.828.000	-7.162.000
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Belanja Barang Pakai Habis	3.863.600	Belanja Barang Pakai Habis	2.892.400	-971.200
			Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	70.000.000	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	70.000.000	0
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.58.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.429.000	-1.429.000
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap	Belanja Barang Pakai Habis	18.777.100	Belanja Barang Pakai Habis	18.323.300	-453.800

		Bencana Kabupaten/Kota					
			Belanja Jasa Kantor	120.582.000	Belanja Jasa Kantor	160.776.000	40.194.000
			Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.126.561	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.104.718	2.978.157
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.801.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.277.000	-8.524.000
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Belanja Barang Pakai Habis	16.979.700	Belanja Barang Pakai Habis	0	-16.979.700
			Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	-200.000.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.600.0000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0	-58.600.000
		Pelathan Dan Pencegahan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Belanja Barang Pakai Habis	16.131.600	Belanja Barang Pakai Habis	12.093.600	-4.038.000
			Belanja Jasa Kantor	3.900.000	Belanja Jasa Kantor	17.500.000	13.600.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.480.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.740.000	-5.740.000
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Zoonosis Prioritas	Belanja Barang Pakai Habis	5.790.200	Belanja Barang Pakai Habis	4.416.220	-1.373.900
		Respon Cepat Darurat Kabupaten/Kota	Belanja Barang Pakai Habis	76.913.060	Belanja Barang Pakai Habis	58.340.680	-18.572.380
			Belanja Jasa Kantor	71.175.000	Belanja Jasa Kantor	94.900.000	23.725.000

			Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.031.440	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.031.440	0
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000	-3.000.000
		Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Belanja Barang Pakai Habis	3.200.000	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000	-2.000.000
			Belanja Jasa Kantor	7.200.000	Belanja Jasa Kantor	3.600.000	-3.600.000
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Belanja Barang Pakai Habis	23.310.600	Belanja Barang Pakai Habis	22.887.700	-422.900
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.644.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.002.000	-6.642.000
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Belanja Barang Pakai Habis	8.998.400	Belanja Barang Pakai Habis	4.218.100	-4.780.300
			Belanja Jasa Kantor	15.750.000	Belanja Jasa Kantor	7.350.000	-8.400.000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Koordinasi dan Penanganan Pasacabencana Kabupaten/Kota	Belanja Barang Pakai Habis	28.392.900	Belanja Barang Pakai Habis	20.550.000	-7.842.900
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.016.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.794.000	-11.222.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk penyesuaian perencanaan tahunan terhadap dinamika kebijakan, kondisi riil pelaksanaan program, serta perkembangan kebutuhan penanggulangan bencana di daerah. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran, sekaligus memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan, efektif dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan TA 2025 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan semester berjalan, perubahan asumsi kebijakan, penyesuaian pagu anggaran, serta kebutuhan mendesak yang memerlukan penguatan dukungan program dan kegiatan.

Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah, khususnya dalam upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan.

Melalui perubahan renja ini, diharapkan target kinerja yang telah ditetapkan dapat tetap tercapai secara optimal meskipun terdapat keterbatasan sumber daya. Penyesuaian target indikator maupun alokasi anggaran dilakukan secara rasional dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabel.

Keberhasilan implementasi perubahan Renja TA 2025 sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran BPBD Kota Magelang, serta sinergi dengan para pemangku kepentingan.

Pengendalian dan evaluasi perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas dalam penanggulangana bencana

Perumusan Perubahan Renja BPBD Kota Magelang tahun 2025 dengan memperhatikan prioritas dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sebagai konsekuensinya, capaian kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, memungkinkan juga untuk berubah. Pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Perubahan RKPD) terdapat defisit anggaran, yang berakibat bagi penyusunan perubahan rencana kerja OPD harus mengalami pemangkasan anggaran yang cukup signifikan salah satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang. Dilihat secara umum pada perubahan renja 2025 terdapat kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 7.167.510, -, anggaran penetapan yang semula Rp.5.134.501.423,- menjadi 5.141.668.933,-.

Perubahan terbesar pada penyusunan renja perubahan tahun anggaran 2025 adalah penambahan anggaran, bahkan memunculkan sub kegiatan baru yang tidak ada pada proses penyusunan renja 2025 yaitu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 238.772.100,-. yang diperuntukkan guna membangun gudang peralatan dan logistik, serta pemeliharaan atap sebagian gedung, penambahan anggaran ini memiliki

konsekuensi terhadap penyesuaian prioritas program dan kegiatan. Salah satu implikasi strategisnya adalah subkegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang di drop secara keseluruhan pada perubahan renja tahun anggaran 2025. Secara substansi, penghapusan subkegiatan ini tentu memiliki konsekuensi terhadap aspek perencanaan jangka menengah kebencanaan daerah, mengingat dokumen RPB merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Magelang, Agustus 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG

MACHBUB YANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 196512031989021001

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk penyesuaian perencanaan tahunan terhadap dinamika kebijakan, kondisi riil pelaksanaan program, serta perkembangan kebutuhan penanggulangan bencana di daerah. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran, sekaligus memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan, efektif dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan TA 2025 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan semester berjalan, perubahan asumsi kebijakan, penyesuaian pagu anggaran, serta kebutuhan mendesak yang memerlukan penguatan dukungan program dan kegiatan.

Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah, khususnya dalam upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan.

Melalui perubahan renja ini, diharapkan target kinerja yang telah ditetapkan dapat tetap tercapai secara optimal meskipun terdapat keterbatasan sumber daya. Penyesuaian target indikator maupun alokasi anggaran dilakukan secara rasional dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabel.

Keberhasilan implementasi perubahan Renja TA 2025 sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran BPBD Kota Magelang, serta sinergi dengan para pemangku kepentingan.

Pengendalian dan evaluasi perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas dalam penanggulangana bencana

Perumusan Perubahan Renja BPBD Kota Magelang tahun 2025 dengan memperhatikan prioritas dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sebagai konsekuensinya, capaian kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, memungkinkan juga untuk berubah. Pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Perubahan RKPD) terdapat defisit anggaran, yang berakibat bagi penyusunan perubahan rencana kerja OPD harus mengalami pemangkasan anggaran yang cukup signifikan salah satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang. Dilihat secara umum pada perubahan renja 2025 terdapat kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 7.167.510, -, anggaran penetapan yang semula Rp.5.134.501.423,- menjadi 5.141.668.933,-.

Perubahan terbesar pada penyusunan renja perubahan tahun anggaran 2025 adalah penambahan anggaran, bahkan memunculkan sub kegiatan baru yang tidak ada pada proses penyusunan renja 2025 yaitu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 238.772.100,- yang diperuntukkan guna membangun gudang peralatan dan logistik, serta pemeliharaan atap sebagian gedung, penambahan anggaran ini memiliki

konsekuensi terhadap penyesuaian prioritas program dan kegiatan. Salah satu implikasi strategisnya adalah subkegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang di drop secara keseluruhan pada perubahan renja tahun anggaran 2025. Secara substansi, penghapusan subkegiatan ini tentu memiliki konsekuensi terhadap aspek perencanaan jangka menengah kebencanaan daerah, mengingat dokumen RPB merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Magelang, Agustus 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG



MACHBUB YANUARIFAN, S.Pd
NIP. 196512031989021001